

PDRB

PRODUK DOSMETIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KOTA DEPOK
2010-2016



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA DEPOK MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2010-2016**

ISSN :
NOMOR PUBLIKASI : 32760.1706
KATALOG BPS : 9302009.3276
UKURAN BUKU : 18,2 Cm x 25,7 CM
JUMLAH HALAMAN ISI : 66 + viii

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DEPOK

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DEPOK

KATA PENGANTAR

Produk domestik Regional Bruto merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten /kota). Perangkat data ini ada pi;a digunakan untuk kepentingan dengan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengemabangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/pemintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, Yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto Dan Perubahan Inventori), dan Net Ekspor/Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya telah menggunkan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System Of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publksai ini disampaikan penaghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintaha dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terahir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif dangant dihargai daemi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Sukabumi, September 2017

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DEPOK

KEPALA,



Erwan Syahriza

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	5
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	10
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18
2.5 Perubahan Inventori (PI)	20
2.6 Ekspor Impor	23
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA DEPOK MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2010-2016	25
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	26
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	33
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumahtangga	34
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	37
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	38
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	41
3.2.5 Perubahan Inventori	42

	Halaman
3.2.6 Net Ekspor/Impor Barang dan Jasa	43
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA DEPOK 2010-2016	45
4.1 PDRB (Nominal)	46
4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	47
4.3 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	48
4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	49
PENUTUP	51
LAMPIRAN	53
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2010 – 2016	27
Grafik 2.	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2010 – 2016	29
Grafik 3.	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok	29
Grafik 4.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Depok, Tahun 2010—2016	30
Grafik 5.	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2010 – 2016	32

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2010-2016	27
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2010-2016	28
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Depok, Tahun 2010—2015	30
Tabel 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, Tahun 2011—2015	31
Tabel 5.	Indeks Implisit ¹ PDRB Menurut Pengeluaran Kota Depok, Tahun 2010-2016	33
Tabel 6.	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kota Depok, Tahun 2010 – 2016	33
Tabel 7.	Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok, Tahun 2010—2016	35
Tabel 8.	Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok, Tahun 2010—2016 ¹	37
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok, Tahun 2010—2016 (<i>persen</i>) ²	37

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

² Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Tabel 10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Depok, Tahun 2010—2016	38
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Depok, Tahun 2010 – 2016	39
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Depok, Tahun 2010—2016	42
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Depok, Tahun 2010—2016	42
Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Antar Daerah Kota Depok, Tahun 2010—2016	44
Tabel 15.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Depok, Tahun 2010—2016	46
Tabel 16.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Depok, Tahun 2010—2016	47
Tabel 17.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Depok, Tahun 2010—2016	48
Tabel 18.	Incremental Capital Output Ratio, Kota Depok, Tahun 2010 - 2016	49

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1.	PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2010–2016 (juta rupiah)	54
Tabel 2.	PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran 2010–2016 (juta rupiah)	55
Tabel 3.	Distribusi Persentase PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2010–2016 (persen)	56
Tabel 4.	Distribusi Persentase PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen), 2010–2016	57
Tabel 5.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2010–2016 (persen)	58
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2010–2016 (persen)	59
Tabel 7.	Indeks Perkembangan PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2010–2016	60
Tabel 8.	Indeks Perkembangan PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2010–2016	61
Tabel 9.	Indeks Implisit PDRB Kota Depok Menurut Pengeluaran (2010=100), Tahun 2010–2016	62
Tabel 10.	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Depok Menurut Pengeluaran (2010=100), Tahun 2010–2016 (persen)	63

<https://depokkota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)³. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep⁴ penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil

³ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

⁴ *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui

penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat⁵, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kota Depok menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi

dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;

- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁶;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

⁶ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://depokkota.bps.go.id>

BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;

5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga

swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;

4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi

dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kota Depok mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kota Depok mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P Kota Depok yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kota Depok tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS

- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P Kota Depok Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas,

seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya,

yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti

- pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
 - f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
 - h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
- Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1) x
Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kota Depok terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar Kota Depok
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kota Depok didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kota Depok diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KOTA DEPOK
BERDASARKAN PDRB
MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2010 - 2016

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Depok periode 2010 - 2016 dapat tetap tumbuh di atas 6%, yakni sebesar 6,81%; 8,06%; 6,85%; 7,28%, 6,64%; dan 7,28%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Informasi & Komunikasi yang rata-rata tumbuh sebesar 13,65% dari periode 2010 sampai dengan 2016. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Depok didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT).

Pada periode tahun 2010 - 2016 PDRB Kota Depok atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 26.601 miliar Rupiah (2010); 29.594 miliar Rupiah (2011); 33.283 miliar Rupiah (2012); 38.627 miliar Rupiah (2013); 43.806 miliar Rupiah (2014); 48.572 miliar Rupiah (2015) dan 53.388 miliar Rupiah (2016). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Sukabumi pada periode 2010-2016 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2010-2016

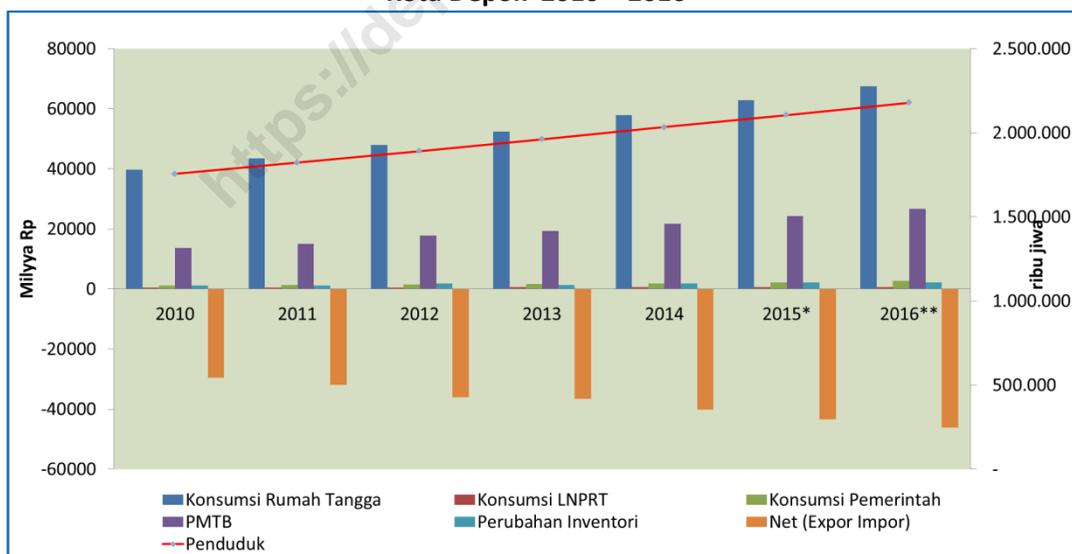
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Konsumsi Rumah Tangga	39.643,73	43.503,08	47.857,41	52.339,15	57.867,61	62.810,93	67.440,12
2 Konsumsi LNPRT	416,36	445,89	472,85	588,51	616,79	659,22	636,54
3 Konsumsi Pemerintah	1.218,82	1.333,39	1.539,74	1.688,14	1.887,10	2.143,98	2.712,34
4 PMTB	13.660,07	14.983,69	17.693,09	19.296,68	21.706,98	24.341,02	26.733,87
5 Perubahan Inventori	1.154,75	1.218,35	1.794,93	1.293,19	1.820,17	2.108,29	2.103,65
6 Net (Expor Impor)	-29.491,88	-31.889,73	-36.074,44	-36.578,47	-40.092,61	-43.490,78	-46.238,45
TOTAL PDRB	26.601,85	29.594,66	33.283,56	38.627,20	43.806,03	48.572,66	53.388,08

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2010 – 2016



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar

harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Depok pada periode 2010-2016 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kota Depok
Tahun 2010-2016**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Konsumsi Rumah Tangga	39.643,73	41.982,51	44.124,65	45.736,18	47.816,43	49.757,92	51.808,60
2 Konsumsi LNPRT	416,36	433,51	446,02	497,25	486,50	501,44	470,66
3 Konsumsi Pemerintah	1.218,82	1.230,05	1.304,47	1.342,62	1.387,81	1.425,49	1.749,13
4 PMTB	13.660,07	14.655,26	16.356,07	16.812,12	17.524,00	18.678,98	20.125,13
5 Perubahan Inventori	1.154,75	1.164,86	1.624,75	1.124,57	1.161,74	1.101,43	1.137,48
6 Net (Expor Impor)	-29.491,88	-31.053,55	-33.152,71	-32.706,85	-33.183,72	-33.935,78	-35.027,77
TOTAL PDRB	26.601,85	28.412,63	30.703,25	32.805,89	35.192,76	37.529,48	40.263,23

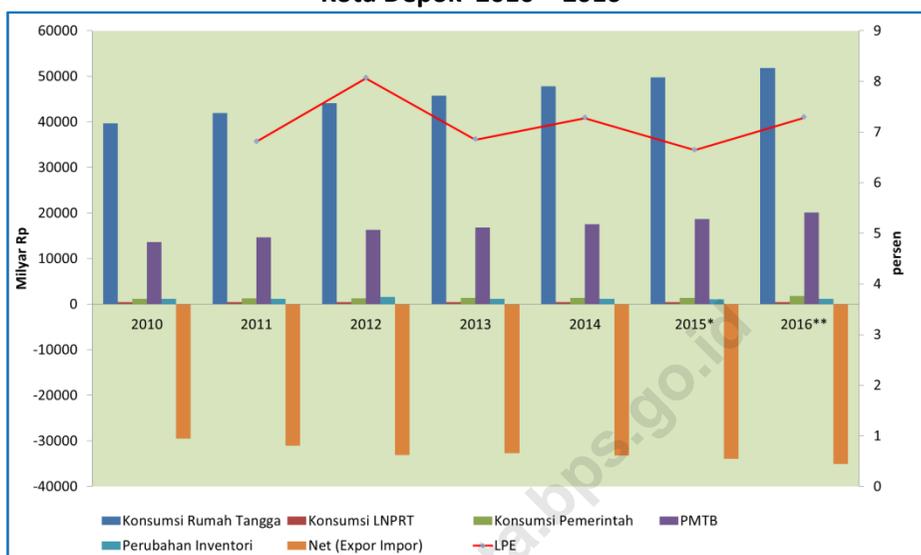
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

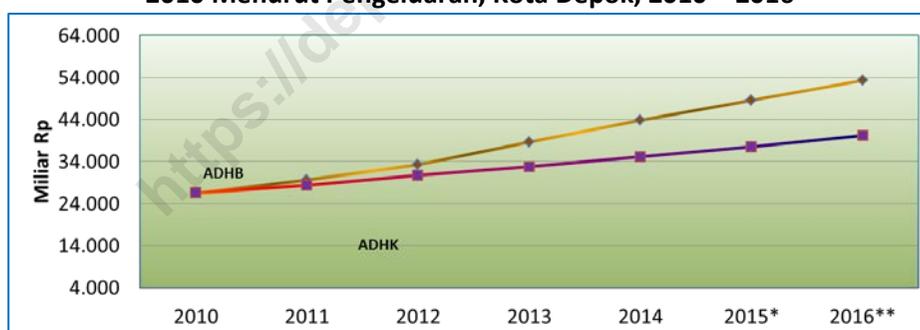
Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kota Depok meningkat, yakni sebesar 26.601 miliar Rupiah (2010); 28.412 miliar Rupiah (2011); 30.703 miliar Rupiah (2012); 32.805 miliar Rupiah (2013); 35.192 miliar Rupiah (2014); 37.529 miliar Rupiah (2015) dan 40.263 miliar Rupiah (2016). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Depok cenderung semakin cepat, yakni dari 6,81 persen pada tahun 2010 menjadi 7,28 persen pada tahun 2016.

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2010 – 2016



Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2010 – 2016



Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2010-2016, PDRB Kota Depok, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 49 s/d 53 persen. Di sisi lain komponen net

impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

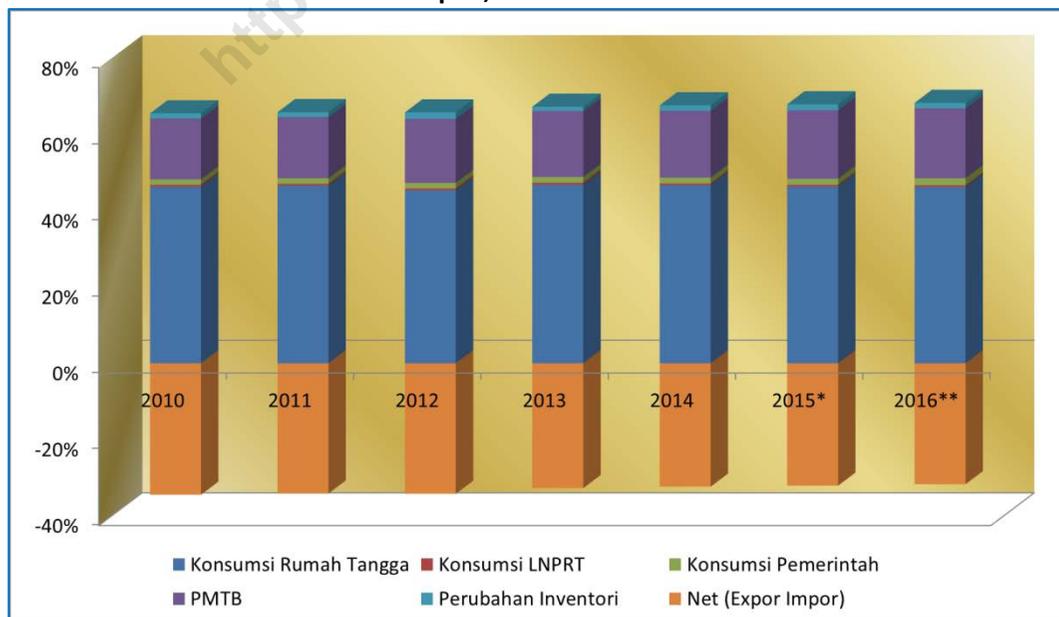
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Depok, Tahun 2010—2016

Komponen Pengeluaran (1)	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Konsumsi Rumah Tangga	149,03	147,00	143,79	135,50	132,10	129,31	126,32
2 Konsumsi LNPRT	1,57	1,51	1,42	1,52	1,41	1,36	1,19
3 Konsumsi Pemerintah	4,58	4,51	4,63	4,37	4,31	4,41	5,08
4 PMTB	51,35	50,63	53,16	49,96	49,55	50,11	50,07
5 Perubahan Inventori	4,34	4,12	5,39	3,35	4,16	4,34	3,94
6 Net (Expor Impor)	-110,86	-107,75	-108,39	-94,70	-91,52	-89,54	-86,61
TOTAL PDRB	100,00						

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 4. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Depok, Tahun 2010—2016



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 4,31 – 5,08 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2010-2016 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen net ekspor/impor, menunjukkan nilai negatif, artinya impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “defisit” atau negatif.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2010 - 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Depok mengalami percepatan, yakni 6,81 persen (2011); 8,06 persen (2012); 6,85 persen (2013); 7,28 persen (2014); 6,64 persen (2015) dan 7,28 persen (2016). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama

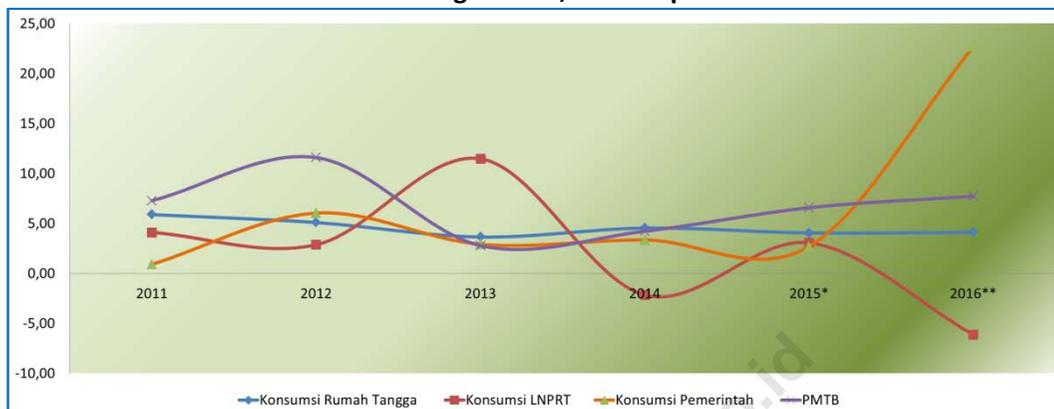
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, Tahun 2010—2016

(Persen)						
Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Konsumsi Rumah Tangga	5,90	5,10	3,65	4,55	4,06	4,12
2 Konsumsi LNPRT	4,12	2,89	11,49	-2,16	3,07	-6,14
3 Konsumsi Pemerintah	0,92	6,05	2,92	3,37	2,71	22,70
4 PMTB	7,29	11,61	2,79	4,23	6,59	7,74
5 Perubahan Inventori						
6 Net (Ekspor Impor)						
TOTAL PDRB	6,81	8,06	6,85	7,28	6,64	7,28

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2010 – 2016



Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok dari tahun 2011 s.d 2016 secara rata-rata mencapai 7,13 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,81 persen (2011); 8,06 persen (2012); 6,85 persen (2013); 7,28 persen(2014); 6,64 persen (2015) dan 7,28 persen (2016). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 8,06 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 (6,64 persen).

Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2010 – 2015, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kota Depok, Tahun 2010 – 2016**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Konsumsi Rumah Tangga	103,62	108,46	114,44	121,02	126,23	130,17
2 Konsumsi LNPRT	102,86	106,02	118,35	126,78	131,47	135,24
3 Konsumsi Pemerintah	108,40	118,04	125,74	135,98	150,40	155,07
4 PMTB	102,24	108,17	114,78	123,87	130,31	132,84
5 Perubahan Inventori	104,59	110,47	114,99	156,68	191,41	184,94
6 Net (Expor Impor)	102,69	108,81	111,84	120,82	128,16	132,01
TOTAL PDRB	104,16	108,40	117,74	124,47	129,43	132,60

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Kota Depok, Tahun 2011 – 2015**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1 Konsumsi Rumah Tangga	0,00	8,79	7,54	5,25	6,34	5,52	5,46
2 Konsumsi LNPRT	0,00	0,06	0,04	0,17	-0,03	0,04	-0,08
3 Konsumsi Pemerintah	0,00	0,04	0,26	0,12	0,14	0,11	0,86
4 PMTB	0,00	3,74	5,99	1,49	2,17	3,28	3,85
5 Perubahan Inventori	0,00	0,04	1,62	-1,63	0,11	-0,17	0,10
6 Net (Expor Impor)	0,00	-5,87	-7,39	1,45	-1,45	-2,14	-2,91
TOTAL PDRB	0,00	6,81	8,06	6,85	7,28	6,64	7,28

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia

pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Depok untuk periode 2010 – 2016.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Depok, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Depok maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010 – 2016 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2010 – 2016 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB selalu menurun namun selalu diatas 100%, yaitu 149,03 persen (2010); 147,00 persen (2011); 143,79 persen (2012); 135,50 persen (2013); 132,10 persen (2014); 129,31 persen (2015) dan 126,32 persen (2016). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 149,03 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 126,32 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2016 terjadi berbagai perubahan pada kondisi perekonomian makro, seperti penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang baru, sehingga berpengaruh pada harga/tarif barang dan jasa yang menggunakan bbm sebagai komponen produksinya.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok, Tahun 2010—2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi Rumah Tangga							
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	39.643,73	43.503,08	47.857,41	52.339,15	57.867,61	62.810,93	67.440,12
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	39.643,73	41.982,51	44.124,65	45.736,18	47.816,43	49.757,92	51.808,60
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	149,03	147,00	143,79	135,50	132,10	129,31	126,32
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)							
a. ADHB	22.581,14	23.861,07	25.294,87	26.673,95	28.457,03	29.822,92	30.938,49
b. ADHK 2010	22.581,14	23.027,05	23.321,93	23.308,84	23.514,26	23.625,29	23.767,45
Pertumbuhan (%)							
a. Total konsumsi RT		5,90	5,10	3,65	4,55	4,06	4,12
b. Perkapita		1,97	1,28	-0,06	0,88	0,47	0,60
Jumlah RT (<i>unit</i>)	440.146	458.677	480.407	496.499	526.004	533.649	551.572
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1.755,61	1.823,18	1.891,98	1.962,18	2.033,51	2.106,13	2.179,81

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2010, setiap rumahtangga di Kota Depok menghabiskan dana sekitar 22.581 ribu Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 23.861 ribu Rupiah (2011); 25.294 ribu Rupiah (2012);

26.673 ribu Rupiah (2013); 28.457 ribu Rupiah (2014); 29.822 ribu Rupiah (2015) dan 30.938 ribu Rupiah (2016). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 0,86 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,97 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 0,47 .s.d 1,97 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel 7.

Pada tahun 2011 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 5,90 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 5,10 persen (2012); 3,65 persen (2013); 4,55 persen (2014); 4,06 persen (2015) dan 4,12 persen (2016). Sementara itu rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 1,97 persen (2011); 1,28 persen (2012); -0,06 persen (2013); 0,88 persen (2014)); 0,47 persen (2015) dan 0,60 persen (2016). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumahtangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun belum dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,90 persen, pada harga kelompok Makanan, Minuman dan rokok .Hal ini diakibatkan oleh tingginya perubahan harga bahan makanan pada periode tersebut.

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok, Tahun 2010—2016⁷

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	24,12	23,80	23,64	23,49	23,41	23,44	23,62
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,84	2,79	2,79	2,89	2,90	2,97	2,99
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan	10,25	10,05	10,01	9,92	9,85	9,81	9,76
d. Kesehatan & Pendidikan	7,75	7,58	7,51	7,49	7,51	7,60	7,64
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	37,80	38,38	38,27	38,25	38,05	37,93	37,81
f. Hotel & Restoran	13,63	13,48	13,71	13,92	14,26	14,24	14,17
g. Lainnya	3,61	3,93	4,07	4,04	4,02	4,01	4,01
Total Konsumsi	100,00						

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok, Tahun 2010—2016 (persen)⁸

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok		6,21	9,46	10,34	7,94	4,50	8,64
b. Pakaian dan Alas Kaki		2,89	1,74	2,61	2,25	1,14	1,63
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga		3,01	3,43	5,74	5,49	6,27	1,28
d. Kesehatan & Pendidikan		2,96	4,04	1,95	5,13	4,00	3,55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya		2,47	2,33	5,12	6,19	5,25	0,24
f. Hotel & Restoran		3,41	3,89	1,37	2,55	1,16	1,25
g. Lainnya		3,23	6,78	1,55	2,96	2,57	2,07

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kota Depok, Tahun 2010—2016**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi LNPRT							
a. ADHB (Miliar Rp)	416,36	445,89	472,85	588,51	616,79	659,22	636,54
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	416,36	433,51	446,02	497,25	486,50	501,44	470,66
Proporsi terhadap PDRB (ADHB) (%)	1,57	1,51	1,42	1,52	1,41	1,36	1,19
Pertumbuhan (ADHK 2010) (%)		4,12	2,89	11,49	-2,16	3,07	-6,14

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2010-2016 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2010 konsumsi LNPRT sebesar 416 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 445 miliar rupiah (2011), 472 miliar rupiah (2012), 588 miliar rupiah (2013), 616 miliar rupiah (2014), 659 miliar rupiah (2015), serta 636 miliar rupiah (2016). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 4,12 persen (2011), 2,89 persen (2012), 11,49 persen (2013), -2,16 persen (2014), 3,07 persen (2015) dan -6,14 persen (2016). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan

jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Depok, Tahun 2010 – 2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi Pemerintah							
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1,218.82	1,333.39	1,539.74	1,688.14	1,887.10	2,143.98	2,712.34
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1,218.82	1,230.05	1,304.47	1,342.62	1,387.81	1,425.49	1,749.13
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4.58	4.51	4.63	4.37	4.31	4.41	5.08
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)							
a. ADHB	694.24	731.35	813.82	860.34	928.00	1,017.97	1,244.30
b. ADHK 2010	694.24	674.67	689.47	684.25	682.47	676.83	802.42
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)							
a. ADHB	152,124.219	165,577.184	199,654.813	218,501.706	246,068.049	273,153.201	346,492.644
b. ADHK 2010	152,124.219	152,743.782	169,148.310	173,778.935	180,963.786	181,614.089	223,445.876
Pertumbuhan[%]							
a. Total konsumsi pemerintah		0.92	6.05	2.92	3.37	2.71	22.70
b. Konsumsi perkapita		-2.82	2.19	-0.76	-0.26	-0.83	18.56
c. Konsumsi per-pegawai		0.41	10.74	2.74	4.13	0.36	23.03
Jumlah Pegawai Pemerintah (org)	8,012	8,053	7,712	7,726	7,669	7,849	7,828
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1,755.61	1,823.182	1,891.981	1,962.182	2,033.508	2,106.129	2,179.813

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 1.218,82 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 2.712,34 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB yang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berada di level 4 persen, namun di tahun 2016 meningkat menjadi 5,08 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 694 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 731 ribu rupiah (2011); 813 ribu rupiah (2012); 860 ribu rupiah (2013); 928 ribu rupiah (2014) ; 1.017 ribu rupiah (2015) dan mencapai 1.244 ribu rupiah pada tahun 2016.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2011) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 dimana pertumbuhannya mencapai 18,56%.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar Rp 152.124.219,- , kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012 dan 2016, yaitu masing-masing sebesar 10,74 persen dan 23,03 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukan peningkatan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Selama periode tahun 2011 s.d 2014 jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah untuk

melakukan moratorium jumlah PNS. Peningkatan jumlah pegawai pemerintah baru dialami Kota Depok tahun 2015, Pada tahun 2011 jumlah pemerintah berjumlah 8.053 orang , 7.712 orang (2012), 7.726 orang (2013), 7.669 orang (2014) dan 7.849 orang (2015). Dalam kurun waktu 2010 - 2016, secara total terjadi penurunan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 184 orang atau turun sebesar 2,30 persen dari tahun 2010.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2012 dan 2016, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 6,05 persen dan 22,70 persen; untuk konsumsi per-kapita 2,19 persen dan 18,56 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2016 yaitu 10,74 persen dan 23,03 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai Pengeluaran. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data pada Tabel 12 di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2010 – 2016 berfluktuasi dari 51,35 persen (2010) menjadi 50,07 persen (2016), sementara di tahun lainnya masing-masing 50,63 persen (2011); 53,16 persen (2012); 49,96 persen

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

(2013); 49,55 persen(2014); dan 50,11 persen(2015). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada Tahun 2012.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Depok, Tahun 2010—2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total PMTB							
a. ADHB (Miliar Rp)	13,660.07	14,983.69	17,693.09	19,296.68	21,706.98	24,341.02	26,733.87
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	13,660.07	14,655.26	16,356.07	16,812.12	17,524.00	18,678.98	20,125.13
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	51.35	50.63	53.16	49.96	49.55	50.11	50.07

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Depok, Tahun 2010—2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Nilai Inventori							
a. ADHB (Miliar Rp)	1,154.75	1,218.35	1,794.93	1,293.19	1,820.17	2,108.29	2,103.65
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1,154.75	1,164.86	1,624.75	1,124.57	1,161.74	1,101.43	1,137.48
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4.34	4.12	5.39	3.35	4.16	4.34	3.94

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2010 terjadi perubahan inventori sebesar 1.154,75 miliar rupiah, sedangkan tahun 2016 perubahan inventori mengalami penambahan sebesar 2.103,65 miliar rupiah. Nilai positif dalam perubahan inventori tetap dialami oleh Kota Depok dalam tahun-tahun yang lain, yaitu 1.293,19 miliar rupiah (2013), 1.820,17 miliar rupiah (2014) dan 2.108,29 miliar rupiah (2015).

3.2.6. Perkembangan Net Ekspor/Impor Antar Daerah

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut Pengeluaran. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Selama tahun 2010-2016 nilai nominal net ekspor Kota Depok selalu bernilai negatif, yang artinya neraca antar daerah di Kota Depok mengalami defisit, nilai ekspor Kota Depok lebih rendah dari impor antar daerahnya. Pada tahun 2010 nilai net ekspor sebesar negatif 29.491,88 miliar rupiah, tahun 2011 nilai net ekspor sebesar negatif 31.889,73 miliar rupiah, kemudian negatif 36.074,44 miliar rupiah (2012), negatif 36.578,47 miliar rupiah (2013) dan bergerak tambah tinggi di tahun-tahun berikutnya yaitu 40.092,61 miliar rupiah (2014), 43.490,78 miliar rupiah (2015) dan 46.238,45 miliar rupiah (2016). Sementara ditinjau dari proporsi komponen net ekspor antar daerah terhadap total PDRB Kota Depok, berkisar diantara -86,61 persen hingga -110,86 persen, dengan proporsi tertinggi dialami pada tahun 2010 sebesar -110,86 persen dan terendah sebesar -86,61 persen di tahun 2016.

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Antar Daerah Kota Depok, Tahun 2010—2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Nilai Net Ekspor Antar Daerah							
a. ADHB (Miliar Rp)	-29,491.88	-31,889.73	-36,074.44	-36,578.47	-40,092.61	-43,490.78	-46,238.45
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-29,491.88	-31,053.55	-33,152.71	-32,706.85	-33,183.72	-33,935.78	-35,027.77
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-110.86	-107.75	-108.39	-94.70	-91.52	-89.54	-86.61

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

https://data.kota.bps.go.id

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN
KOTA DEPOK
TAHUN 2010 - 2016

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Depok, Tahun 2010—2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)							
- ADHB	26,601.85	29,594.66	33,283.56	38,627.20	43,806.03	48,572.66	53,388.08
- ADHK 2010	26,601.85	28,412.63	30,703.25	32,805.89	35,192.76	37,529.48	40,263.23
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)							
- ADHB	15,152.47	16,232.42	17,591.91	19,685.84	21,542.10	23,062.52	24,492.04
- ADHK 2010	15,152.47	15,584.09	16,228.10	16,719.09	17,306.43	17,819.17	18,470.96
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)		2.85	4.13	3.03	3.51	2.96	3.66
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1,755.61	1,823.18	1,891.98	1,962.18	2,033.51	2,106.13	2,179.81
Pertumbuhan (%)		3.85	3.77	3.71	3.64	3.57	3.50

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita Kota Depok tahun 2010 mencapai Rp 15.151.468,- dan di tahun 2016 meningkat lagi hingga Rp 24.492.044,- . Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 2,85 – 4,13 persen, dengan yang tertinggi sebesar 4,13 persen di Tahun 2012 dan terendah terjadi pada Tahun 2011 sebesar 2,85 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang menunjukkan pola perlambatan kecepatan pertumbuhan setiap tahunnya. Di Tahun

2016 laju pertumbuhan penduduk Kota Depok sekitar 3,50 persen. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Depok digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Angka rasio perbandingan antara konsumsi rumah tangga (RT) dengan PMTB menggambarkan besarnya pemakaian PDRB Kota Depok konsumsi RT dan investasi (PMTB). Semakin kecil rasionya berarti bahwa PDRB Kota Depok semakin banyak dipakai untuk investasi sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat.

Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Depok, Tahun 2010—2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	39,643.73	43,503.08	47,857.41	52,339.15	57,867.61	62,810.93	67,440.12
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	13,660.07	14,983.69	17,693.09	19,296.68	21,706.98	24,341.02	26,733.87
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2.90	2.90	2.70	2.71	2.67	2.58	2.52

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Angka rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 2,90 pada Tahun 2010 menjadi 2,52 pada Tahun 2016. Walaupun secara umum nilai rasio konsumsi RT terhadap investasi di Kota Depok cenderung tinggi, namun pola penurunan dalam kurun waktu 2010-2016 mengindikasikan hal yang positif dalam pertumbuhan ekonomi, bahwa secara umum pertumbuhan nilai investasi di Kota Depok bergerak lebih cepat daripada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di Tahun 2016 rasio konsumsi RT terhadap PMTB sebesar 2,52, maknanya adalah penggunaan

PDRB Kota Depok untuk konsumsi rumah tangga 2,52 kali lebih besar dibanding penggunaannya untuk investasi.

4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 17. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Depok, Tahun 2010—2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)							
a. Rumah tangga	39,643.73	43,503.08	47,857.41	52,339.15	57,867.61	62,810.93	67,440.12
b. LNPRT	416.36	445.89	472.85	588.51	616.79	659.22	636.54
c. Pemerintah	1,218.82	1,333.39	1,539.74	1,688.14	1,887.10	2,143.98	2,712.34
Jumlah	41,278.90	45,282.36	49,870.00	54,615.80	60,371.49	65,614.13	70,789.00
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	26,601.85	29,594.66	33,283.56	38,627.20	43,806.03	48,572.66	53,388.08
Proporsi	155.17	153.01	149.83	141.39	137.82	135.08	132.59

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada Tahun 2010-2016 sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Peningkatan nilai konsumsi akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia yang tercermin dari meningkatnya angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Penurunan proporsi konsumsi akhir mengindikasikan penggunaan produk Kota Sukabumi yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang semakin besar, meskipun masih dalam skala yang relatif kecil.

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 18. Incremental Capital Output Ratio,
Kota Depok, Tahun 2010- 2016**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	26,601.85	28,412.63	30,703.25	32,805.89	35,192.76	37,529.48	40,263.23
Perubahan (miliar rupiah)		1,810.77	2,290.62	2,102.64	2,386.87	2,336.71	2,733.76
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	13,660.07	14,655.26	16,356.07	16,812.12	17,524.00	18,678.98	20,125.13
ICOR		8.09	7.14	8.00	7.34	7.99	7.36

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dalam periode 2011-2016 ICOR Kota Depok nilainya berfluktuatif naik turun di kisaran 7,14 – 8,09. Pada Tahun 2016 besaran ICOR sebesar 7,36 artinya untuk meningkatkan PDRB Kota Depok sebesar 1 rupiah diperlukan investasi sebesar 7,36

rupiah. Pola peningkatan dan penurunan ICOR yang ditunjukkan pada tabel 18 mencatat bahwa di Tahun 2015 untuk meningkatkan nilai PDRB Kota Depok 1 rupiah dibutuhkan investasi 7,99 rupiah. Peningkatan investasi akan diikuti dengan bertambahnya nilai pembelian terhadap barang-barang modal, seperti mesin atau peralatan dan sarana produksi lainnya. Tentunya pembelian barang modal akan digunakan untuk melakukan produksi di berbagai jenis bidang yang mendorong tumbuhnya usaha baru & terciptanya lapangan kerja. Dampak nyata yang langsung dapat dirasakan dari tumbuhnya usaha baru, khususnya di bidang industri pengolahan (manufaktur) adalah peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja, yang artinya akan menekan tingkat pengangguran.

<https://depokkota.bps.go.id>

<https://depokkota.bps.go.id>

BAB V ***PENUTUP***

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2010 s.d 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Depok pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi Lapangan Usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.

<https://depokkota.bps.go.id>

LAMPIRAN

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT PENGELUARAN, KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016

(JUTA RUPIAH)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	39,643,725.66	43,503,076.14	47,857,411.27	52,339,145.75	57,867,606.77	62,810,933.18	67,440,123.60
1 (1.a s/d 1.g)							
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,561,224.08	10,612,436.35	12,129,006.18	13,784,626.18	15,499,329.50	16,873,614.04	19,234,251.71
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,126,124.11	1,203,325.22	1,290,366.69	1,417,492.09	1,525,132.55	1,640,421.70	1,747,854.31
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,062,144.62	4,344,208.89	4,706,310.47	5,109,112.66	5,595,173.01	6,165,277.47	6,468,220.55
d. Kesehatan & Pendidikan	3,072,249.20	3,277,777.40	3,547,657.78	3,742,779.42	4,124,529.96	4,516,685.85	4,895,408.44
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,986,081.79	16,510,173.55	17,705,376.56	19,282,455.10	21,292,093.47	23,249,433.76	24,189,769.64
f. Hotel & Restoran	5,404,835.41	5,853,747.05	6,498,511.81	6,936,106.02	7,617,215.75	8,005,424.10	8,400,137.70
g. Lainnya	1,431,066.45	1,701,407.68	1,980,181.78	2,066,574.27	2,214,132.52	2,360,076.26	2,504,481.25
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	416,359.98	445,886.41	472,846.00	588,513.50	616,786.38	659,219.91	636,536.79
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,218,819.24	1,333,393.06	1,539,737.92	1,688,144.18	1,887,095.87	2,143,979.47	2,712,344.42
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,660,074.88	14,983,690.18	17,693,085.28	19,296,679.51	21,706,981.88	24,341,017.22	26,733,866.06
a. Bangunan	10,938,217.37	11,914,625.16	13,973,415.69	15,836,113.19	17,959,824.15	20,226,748.27	22,138,349.95
b. Non-Bangunan	2,721,857.51	3,069,065.02	3,719,669.59	3,460,566.32	3,747,157.73	4,114,268.95	4,595,516.11
5 Perubahan Inventori	1,154,753.69	1,218,349.02	1,794,925.84	1,293,187.37	1,820,171.68	2,108,289.85	2,103,653.36
6 Net Expor	-29,491,879.02	-31,889,729.90	-36,074,443.94	-36,578,474.59	-40,092,608.01	-43,490,777.01	-46,238,448.08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26,601,854.43	29,594,664.91	33,283,562.37	38,627,195.72	43,806,034.57	48,572,662.62	53,388,076.15

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
MENURUT PENGELUARAN, KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016

Komponen Pengeluaran	(JUTA RUPIAH)						
	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)	2015* (7)	2016** (8)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	39,643,725.66	41,982,505.51	44,124,648.25	45,736,177.90	47,816,432.15	49,757,919.17	51,808,596.22
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,561,224.08	9,991,943.38	10,432,863.54	10,745,714.08	11,194,059.62	11,662,231.60	12,236,752.14
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,126,124.11	1,169,507.03	1,232,621.43	1,319,586.73	1,388,485.13	1,476,552.57	1,548,081.64
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,062,144.62	4,217,253.29	4,417,311.82	4,535,272.86	4,708,307.77	4,881,756.66	5,056,899.09
d. Kesehatan & Pendidikan	3,072,249.20	3,183,401.20	3,311,795.99	3,427,168.52	3,592,590.41	3,782,856.26	3,959,572.40
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,986,081.79	16,111,699.37	16,885,154.24	17,493,970.10	18,191,888.80	18,872,831.78	19,589,208.23
f. Hotel & Restoran	5,404,835.41	5,660,576.44	6,048,478.57	6,368,235.67	6,819,992.82	7,085,166.84	7,342,416.70
g. Lainnya	1,431,066.45	1,648,124.80	1,796,422.65	1,846,229.94	1,921,107.61	1,996,523.45	2,075,666.00
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	416,359.98	433,507.84	446,017.20	497,247.25	486,502.95	501,436.63	470,659.86
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,218,819.24	1,230,045.68	1,304,471.77	1,342,616.05	1,387,811.27	1,425,488.98	1,749,134.32
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,660,074.88	14,655,255.07	16,356,073.57	16,812,123.94	17,524,000.68	18,678,978.18	20,125,134.36
a. Bangunan	10,938,217.37	11,676,256.67	13,095,272.49	13,843,859.65	14,456,539.01	15,465,512.81	16,678,955.20
b. Non-Bangunan	2,721,857.51	2,978,998.39	3,260,801.08	2,968,264.29	3,067,461.67	3,213,465.37	3,446,179.17
5 Perubahan Inventori	1,154,753.69	1,164,862.71	1,624,750.33	1,124,572.19	1,161,735.16	1,101,434.84	1,137,480.43
6 Net (Expor Impor)	-29,491,879.02	-31,053,548.22	-33,152,711.79	-32,706,846.24	-33,183,720.39	-33,935,782.43	-35,027,772.01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26,601,854.43	28,412,628.58	30,703,249.32	32,805,891.10	35,197,761.82	37,529,475.36	40,263,233.18

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT PENGELUARAN, KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	(PERSEN)						
	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)	2015* (7)	2016** (8)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	149.03	147.00	143.79	135.50	132.10	129.31	126.32
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	35.94	35.86	36.44	35.69	35.38	34.74	36.03
b. Pakaian dan Alas Kaki	4.23	4.07	3.88	3.67	3.48	3.38	3.27
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	15.27	14.68	14.14	13.23	12.77	12.69	12.12
d. Kesehatan & Pendidikan	11.55	11.08	10.66	9.69	9.42	9.30	9.17
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	56.33	55.79	53.20	49.92	48.61	47.87	45.31
f. Hotel & Restoran	20.32	19.78	19.52	17.96	17.39	16.48	15.73
g. Lainnya	5.38	5.75	5.95	5.35	5.05	4.86	4.69
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.57	1.51	1.42	1.52	1.41	1.36	1.19
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.58	4.51	4.63	4.37	4.31	4.41	5.08
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	51.35	50.63	53.16	49.96	49.55	50.11	50.07
a. Bangunan	41.12	40.26	41.98	41.00	41.00	41.64	41.47
b. Non-Bangunan	10.23	10.37	11.18	8.96	8.55	8.47	8.61
5 Perubahan Inventori	4.34	4.12	5.39	3.35	4.16	4.34	3.94
6 Net (Expor Impor)	-110.86	-107.75	-108.39	-94.70	-91.52	-89.54	-86.61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN
MENURUT PENGELUARAN, KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	(PERSEN)							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		149.03	147.76	143.71	139.41	135.87	132.58	128.67
1 (1.a s/d 1.g)								
a. Makanan, Minuman, dan Rokok		35.94	35.17	33.98	32.76	31.81	31.07	30.39
b. Pakaian dan Alas Kaki		4.23	4.12	4.01	4.02	3.95	3.93	3.84
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga		15.27	14.84	14.39	13.82	13.38	13.01	12.56
d. Kesehatan & Pendidikan		11.55	11.20	10.79	10.45	10.21	10.08	9.83
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya		56.33	56.71	54.99	53.33	51.69	50.29	48.65
f. Hotel & Restoran		20.32	19.92	19.70	19.41	19.38	18.88	18.24
g. Lainnya		5.38	5.80	5.85	5.63	5.46	5.32	5.16
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR		1.57	1.53	1.45	1.52	1.38	1.34	1.17
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		4.58	4.33	4.25	4.09	3.94	3.80	4.34
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto		51.35	51.58	53.27	51.25	49.79	49.77	49.98
5 Perubahan Inventori		4.34	4.10	5.29	3.43	3.30	2.93	2.83
6 Net (Expor Impor)		-110.86	-109.29	-107.98	-99.70	-94.29	-90.42	-87.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 5. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT PENGELUARAN, KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	(PERSEN)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	9.74	10.01	9.36	10.56	8.54	7.37	7.37
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	10.99	14.29	13.65	12.44	8.87	13.99	13.99
b. Pakaian dan Alas Kaki	6.86	7.23	9.85	7.59	7.56	6.55	6.55
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.94	8.34	8.56	9.51	10.19	4.91	4.91
d. Kesehatan & Pendidikan	6.69	8.23	5.50	10.20	9.51	8.38	8.38
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10.17	7.24	8.91	10.42	9.19	4.04	4.04
f. Hotel & Restoran	8.31	11.01	6.73	9.82	5.10	4.93	4.93
g. Lainnya	18.89	16.38	4.36	7.14	6.59	6.12	6.12
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	7.09	6.05	24.46	4.80	6.88	-3.44	-3.44
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.40	15.48	9.64	11.79	13.61	26.51	26.51
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.69	18.08	9.06	12.49	12.13	9.83	9.83
a. Bangunan	8.93	17.28	13.33	13.41	12.62	9.45	9.45
b. Non-Bangunan	12.76	21.20	-6.97	8.28	9.80	11.70	11.70
5 Perubahan Inventori	5.51	47.32	-27.95	40.75	15.83	-0.22	-0.22
6 Net (Expor Impor)	8.13	13.12	1.40	9.61	8.48	6.32	6.32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.25	12.46	16.05	13.41	10.88	9.91	9.91

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 6. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN
MENURUT PENGELUARAN, KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	(PERSEN)					
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015* (6)	2016** (7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	5.90	5.10	3.65	4.55	4.06	4.12
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.50	4.41	3.00	4.17	4.18	4.93
b. Pakaian dan Alas Kaki	3.85	5.40	7.06	5.22	6.34	4.84
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.82	4.74	2.67	3.82	3.68	3.59
d. Kesehatan & Pendidikan	3.62	4.03	3.48	4.83	5.30	4.67
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7.51	4.80	3.61	3.99	3.74	3.80
f. Hotel & Restoran	4.73	6.85	5.29	7.09	3.89	3.63
g. Lainnya	15.17	9.00	2.77	4.06	3.93	3.96
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	4.12	2.89	11.49	-2.16	3.07	-6.14
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.92	6.05	2.92	3.37	2.71	22.70
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.29	11.61	2.79	4.23	6.59	7.74
a. Bangunan	6.75	12.15	5.72	4.43	6.98	7.85
b. Non-Bangunan	9.45	9.46	-8.97	3.34	4.76	7.24
5 Perubahan Inventori	0.88	39.48	-30.78	3.30	-5.19	3.27
6 Net (Expor Impor)	5.30	6.76	-1.34	1.46	2.27	3.22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.81	8.06	6.85	7.28	6.64	7.28

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 7. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT PENGELUARAN, KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	109.74	120.72	132.02	145.97	158.44	170.12
1 (1.a s/d 1.g)						
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	110.99	126.86	144.17	162.11	176.48	201.17
b. Pakaian dan Alas Kaki	106.86	114.58	125.87	135.43	145.67	155.21
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	106.94	115.86	125.77	137.74	151.77	159.23
d. Kesehatan & Pendidikan	106.69	115.47	121.83	134.25	147.02	159.34
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	110.17	118.15	128.67	142.08	155.14	161.41
f. Hotel & Restoran	108.31	120.24	128.33	140.93	148.12	155.42
g. Lainnya	118.89	138.37	144.41	154.72	164.92	175.01
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	107.09	113.57	141.35	148.14	158.33	152.88
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	109.40	126.33	138.51	154.83	175.91	222.54
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	109.69	129.52	141.26	158.91	178.19	195.71
a. Bangunan	108.93	127.75	144.78	164.19	184.92	202.39
b. Non-Bangunan	112.76	136.66	127.14	137.67	151.16	168.84
5 Perubahan Inventori	105.51	155.44	111.99	157.62	182.57	182.17
6 Net (Expor Impor)	108.13	122.32	124.03	135.94	147.47	156.78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	111.25	125.12	145.20	164.67	182.59	200.69

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 8. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN
MENURUT PENGELUARAN. KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	105.90	111.30	115.37	120.62	125.51	130.69
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	104.50	109.12	112.39	117.08	121.97	127.98
b. Pakaian dan Alas Kaki	103.85	109.46	117.18	123.30	131.12	137.47
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	103.82	108.74	111.65	115.91	120.18	124.49
d. Kesehatan & Pendidikan	103.62	107.80	111.55	116.94	123.13	128.88
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	107.51	112.67	116.73	121.39	125.94	130.72
f. Hotel & Restoran	104.73	111.91	117.82	126.18	131.09	135.85
g. Lainnya	115.17	125.53	129.01	134.24	139.51	145.04
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	104.12	107.12	119.43	116.85	120.43	113.04
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100.92	107.03	110.16	113.87	116.96	143.51
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	107.29	119.74	123.07	128.29	136.74	147.33
a. Bangunan	106.75	119.72	126.56	132.17	141.39	152.48
b. Non-Bangunan	109.45	119.80	109.05	112.70	118.06	126.61
5 Perubahan Inventori	100.88	140.70	97.39	100.60	95.38	98.50
6 Net (Expor Impor)	105.30	112.41	110.90	112.52	115.07	118.77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	106.81	115.42	123.32	132.29	141.08	151.35

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

TABEL 9. INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (2010=100)
MENURUT PENGELUARAN, KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1 (1.a s/d 1.g)	103.62	108.46	114.44	121.02	126.23	130.17
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	106.21	116.26	128.28	138.46	144.69	157.18
b. Pakaian dan Alas Kaki	102.89	104.68	107.42	109.84	111.10	112.90
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	103.01	106.54	112.65	118.84	126.29	127.91
d. Kesehatan & Pendidikan	102.96	107.12	109.21	114.81	119.40	123.63
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	102.47	104.86	110.22	117.04	123.19	123.49
f. Hotel & Restoran	103.41	107.44	108.92	111.69	112.99	114.41
g. Lainnya	103.23	110.23	111.93	115.25	118.21	120.66
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	102.86	106.02	118.35	126.78	131.47	135.24
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	108.40	118.04	125.74	135.98	150.40	155.07
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	102.24	108.17	114.78	123.87	130.31	132.84
a. Bangunan	102.04	106.71	114.39	124.23	130.79	132.73
b. Non-Bangunan	103.02	114.07	116.59	122.16	128.03	133.35
5 Perubahan Inventori	104.59	110.47	114.99	156.68	191.41	184.94
6 Net (Expor impor)	102.69	108.81	111.84	120.82	128.16	132.01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	104.16	108.40	117.74	124.47	129.43	132.60

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 10. LAJU PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (2010 =100)
MENURUT PENGELUARAN. KOTA DEPOK TAHUN 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	(PERSEN)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.62	4.67	5.51	5.75	4.31	3.12
1.a s/d 1.g						
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6.21	9.46	10.34	7.94	4.50	8.64
b. Pakaian dan Alas Kaki	2.89	1.74	2.61	2.25	1.14	1.63
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.01	3.43	5.74	5.49	6.27	1.28
d. Kesehatan & Pendidikan	2.96	4.04	1.95	5.13	4.00	3.55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2.47	2.33	5.12	6.19	5.25	0.24
f. Hotel & Restoran	3.41	3.89	1.37	2.55	1.16	1.25
g. Lainnya	3.23	6.78	1.55	2.96	2.57	2.07
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	2.86	3.07	11.64	7.12	3.70	2.87
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.40	8.89	6.52	8.14	10.61	3.10
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.24	5.80	6.10	7.92	5.20	1.94
a. Bangunan	2.04	4.57	7.20	8.60	5.27	1.49
b. Non-Bangunan	3.02	10.72	2.20	4.78	4.81	4.15
5 Perubahan Inventori	4.59	5.62	4.09	36.25	22.17	-3.38
6 Net (Expor Impor)	2.69	5.96	2.78	8.03	6.07	3.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.16	4.07	8.62	5.72	3.98	2.45

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

<https://depo.kota.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.

20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

<https://depokkota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

JL. BOULEVARD KOTA KEMBANG, CILDONG KOTA DEPOK
PDRB Kota Depok Menurut Pengeluaran 1999-2016
TELP. 021-7710370, FAX. 021-77825913
EMAIL : BPS3276@BPS.GO.ID